



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHIDIN
2. Jabatan : PANITERA KONSTITUSI AHLI UTAMA
3. NHK : 112637

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.920.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 1.310.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.760.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.310.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 780.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	298.000.000
1. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 292.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	870.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.131.000.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.131.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.